ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

Sunarno Basuki

JPOK FKIP Unlam Jl. Raya Taruna Praja Raya Banjarbaru
e-mail: sunarno_basuki@gmail.com

Abstract: Universities have an important role in providing competitive and quality human resources. Therefore, the need for quality assurance and accreditation system for universities as evidence that the process of forming human resources guaranteed. Health Physical Education Studies Recreation Departemen of Lambung Mangkurat University is expected to become the center of education and research in the field of human resource development of health physical education and recreation in South Kalimantan. As a policy, the Internal Quality Assurance System (SPMI) should be implemented.

This study attempted to answer how the implementation process and factor constraints faced during the implementation of the SPMI. By using a qualitative research design, this study put forward some conclusions as follows: (a) The implementation process of internal quality assurance system in the course of health physical education and recreation FKIP UNLAM not run well. The system is still prominent in the interpretation stage, less than the maximum at the application stage and (b) some of the factors that make implementation constraints internal quality assurance system in the course of health physical education and recreation FKIP UNLAM not run well, namely: communication factors that are less intensive, inadequate human resources, the structure of the firm and the attitude or the commitment of officials and professors less than the maximum.

Keywords: standard internal quality assurance, accreditation and implementation.

Abstrak: Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu perlu adanya sistem penjaminan mutu dan akreditasi bagi perguruan tinggi sebagai bukti bahwa proses pembentukan SDM tersebut terjamin. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas Lambung Mangkurat diharapkan menjadi pusat pendidikan dan riset pengembangan SDM dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi di Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah kebijakan, Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) harus menjadi diimplementasikan.

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana proses implementasi dan faktor kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan SPMI tersebut. Dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif, penelitian ini mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut : (a) Proses implementasi sistem penjaminan mutu internal di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unlam belum berjalan dengan baik. Sistem tersebut masih menonjol pada tahap interpretasi, kurang maksimal pada tahap penerapan dan (b) beberapa faktor kendala yang membuat implementasi sistem penjaminan mutu internal di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi

FKIP Unlam belum berjalan dengan baik yaitu: faktor komunikasi yang kurang intensif, sumber daya manusia kurang memadai, struktur yang belum tegas dan sikap atau komitmen dari para pejabat dan dosen kurang maksimal.

Kata Kunci : Standar penjaminan mutu internal, akreditasi dan implementasi

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam penyajian dan penyerapan ilmu karena ditunjang dengan kualitas pendidik, layanan administrasi, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi faktor yang sangat menentukan. Tentunya perguruan tinggi yang berkualitaslah yang akan menjadi pilihan pertama bagi calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan. Tolak ukur kualitas perguruan tinggi tersebut dapat dilihat dari sarjana-sarjana yang dicetak apakah mampu bersaing di dunia kerja atau malah hanya menjadi pengangguran terdidik.

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development) perusahaan-perusahaan sangat sulit mendapatkan lulusan yang siap pakai dan dapat berpikir kritis. Lebih jauh lagi, survei yang dilakukan oleh World Bank menemukan sekitar 20 - 25 persen lulusan perguruan tinggi lokal memerlukan pelatihan ulang sebelum dapat bekerja. Demikian pula universitas-universitas dari Indonesia masih tertinggal dari negara-negara sekitarnya. Dari sisi global *competitiveness,* sangat kontras jika dibandingkan dengan India misalnya, di mana lulusan sarjana, master, sampai doktor dari India sangat diminati dan banyak terpakai di berbagai negara, termasuk juga sudah membanjiri Indonesia (Koran Jakarta, 2012).

Begitu pentingnya mutu bagi pendidikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional, yang pada pasal 91 menyatakan Setiap Satuan pendidikan pada jalur Formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan hal yang wajib dalam sebuah Perguruan Tinggi dan setiap Perguruan Tinggi diberi kebebasan untuk menentukan sendiri standar mutunya serta mekanisme pemenuhan standar tersebut. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik. Dengan demikian "Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)" telah berubah menjadi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT).

Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat dengan demikian memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan amanat undang- undang dalam sistem penjaminan mutu dan akreditasi sebagai bentuk upaya meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut. Sebagai universitas yang sudah lama berdiri, diresmikan

tahun 1960, tentu sudah cukup memiliki modal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikannya. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Keberhasilan implementasi tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi, sumber daya, struktur dan disposisi. Dalam pengertian disposisi ini termasuk di dalamnya ada sikap dari para pelaksana. Secara keseluruhan proses implementasi di dalamnya terdapat tiga aktivitas utama, yaitu interpretasi, pengorganisasi dan aplikasi (Winarno, 2002). Secara khusus dalam kajian penelitian ini bertujuan untuk; 1) Memperoleh gambaran mengenai proses implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Lambung Mangkurat. Dan 2) Mengetahui faktor apa saja yang menjadi penentu berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Lambung Mangkurat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mendapatkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Desain penelitian kualitatif dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergent dimana phenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu pehenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian dilapangan (Moleong, 2003). Sumber data penelitian ini ada beberapa ,yaitu :

1) Primer, sumber data primer ini adalah :
   a) Subyek atau pelaku implementasi, bisa seluruh civitas akademika dari program studi yang diteliti
   b) Kejadian atau peristiwa seperti pelaksanaan akreditas, perencanaan dan sebagainya
2) Sekunder, sumber data ini adalah :
   a) Hasil studi orang lain
   b) Kepustakaan
   c) Dokumen menyangkut SPMI

Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, yaitu :

1) Wawancara
   Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan fokus-fokus yang harus diliput tanpa dengan tetap memperhatikan pedoman wawancara
2) Observasi
   Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan

Hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini berbagai dokumen menyangkut SPMI di lokasi penelitian akan dikumpulkan, dianalisis dalam rangka untuk melengkapi data-data lainnya guna menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

Lokasi penelitian ini adalah Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Subyek penelitian ini adalah para dosen dan staf di Program Studi Tersebut yang kemudian dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga subyek penelitiannya adalah ketua program studi, pimpinan staf, dan beberapa dosen.

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), biasa dikenal dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FKIP Universitas Lambung Mangkurat mulai beroperasi pada tanggal 11-07-1996 berdasarkan Surat Keputusan DIKTI : 84/DIKTI/KEP/2007. Visi yang ditujua adalah “menghasilkan Tenaga Profesional Dibidang Jasmani Dan Rekreasi Untuk Dapat Bersaing Di Dunia Kerja”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : Dalam Masa Sepuluh Tahun Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Dapat Menjadi Pusat Kajian Pendidikan Jasmani dan Pusat Kajian Ilmu Keolahragaan Khususnya Di Kalimantan Selatan dan Pulau Kalimantan Secara Umum.Unit penjamin mutu dalam hal ini menginduk pada fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP), dengan visi terwujudnya tradisi dan budaya mutu bagi seluruh civitas akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam.

Akreditasi yang diperoleh program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Lambung Mangkurat pada awalnya adalah B (berakhir pada 22-05-2008 dimulai sejak tahun 2003). Namun akreditasi B tersebut diperoleh kembali pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 18 April 2012 dan berlaku sampai 18 April 2017. Dengan deikian ada jeda waktu lebih dari tiga tahun (2008-2011)program studi tersebut tidak memenuhi akreditas, artinya akreditas tidak diurus oleh pengelola.

Akreditas yang dicapai sebenarnya

mencerminkan adanya proses implementasi penjaminan mutu dalam sebuah lembaga pendidikan. Pencapaian akreditas A misalnya merupakan capaian paling tinggi yang mencerminkan adanya mutu pendidikan di sebuah program studi.

Berikut ini temuan yang menggambarkan proses implementasi di Program Studi Penjaskesrek Unlam :

1. Interpretasi

Proses implementasi yang paling awal dalah interpretasi, penerjemahan rencana atau visi dan misi dari sebuah penjaminan mutu yang sudah disusun sebelumnya. Terwujudnya budaya mutu bagi seluruh civitas akademika dapat diinterpretasikan ke dalam beberapa program kegiatan ataupun strategi program. Berkaitan dengan ini maka interpretasi visi tersebut menonjol pada terjaminnya proses penjaminan mutu serta audit secara simultan dalam rangka menerjemahkan penjaminan mutu di program studi.

Visi program studi penjaskesrek Unlam kemudian ditetapkan sebagai bentuk interpretasi terhadap visi fakultas, yaitu : ”Menjadikan Prodi Sebagai Pusat Kajian Ilmu Olahraga Dan Penjas Di Kalimantan Selatan Hususnya Dan Di Kalimantan Pada Umumnya”. Visi ini diterjemahkan ke dalam bentuk misi secara umum seperti pada fakultas dan menempatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai basis misi program studi.

Penerjemahan yang lebih praktis adalah melalui strategi, yaitu : perencanaan sistem penjaminan mutu, pengembangan budaya bermutu, peluang kegiatan bermutu, penghargaan dan evaluasi. Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan lagi ke dalam bentuk program yang lebih operasional, yaitu : (a) Peningkatan mutu dan profesionalisme dosen, melalui sekolah ke jenjang lebih tinggi, mengikuti kegiatan seminar, diskusi dan diklat, (b) Membiasakan dosen dan mahasiswa mengikuti perlombaan atau kegiatan yang melatih daya saing, (c) Sistem penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang berprestasi, (d) Menerapkan kurikulum yang bermutu, dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, (e) Melakukan audit terhadap berbagai kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan membudayakan bermutu bagi seluruh civitas akademika.

2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian berarti berbicara mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta sumber daya. Dalam hal ini semua itu masih dikendalikan oleh fakultas. Orang-orang yang menangani masalah penjaminan mutu di tingkat program studi belum berjalan maksimal. Demikian pula tugas dan fungsinya juga masih tumpang tindih dengan unit penjaminan mutu tingkat fakultas.Dukungan sumber daya juga kurang memadai, misalnya fasilitas, pendanaan dan tenaga pendukung dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Untuk melakukan pendataan yang up to date tidak bisa mengandalkan tenaga dosen semata, tetapi membutuhkan tenaga khusus bagian pendataan, dan ini tidak bisa terpenuhi, karena berbagai kendala. Sementara mengandalkan bantuan tenaga administrasi di program studi masih terbebani dengan pekerjaan dan tugas lain Yang juga penting

3. Penerapan

Pada tahap penerapan merupakan wujud pelaksanaan dari penerjemahan (interpretasi) dan pengorganisasian. Dalam hal ini ternyata selama 3 tahun (2008-2011) akreditasi di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unversitas Lambung Mangkurat tidak berjalan. Dengan kata lain selama itu pula sistem penjaminan mutu internal tidak berjalan dengan baik. Meski berbagai program seperti peningkatan mutu dosen, keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan bermutu, namun pada akhrnya akreditasi tidak diperoleh.

Memasuki tahun 2012, penerapan penjaminan mutu dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, terbukti dicapainya akreditas B untuk program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unversitas Lambung Mangkurat. Gugus kendali mutu dapat menjalankan fungsinya dalam rangka menjamin mutu internal berjalan pada tahun 2011 dan awal 2012 untuk mengejar akreditas yang sudah lama mati/tidak berlaku. Ketika akreditasi tidak di dapat, konsekuensinya adalah kepercayaan dari masyarakat pengguna (mahasiswa dan calon mahasiswa) mengalami penuruan serta menimbulkan kegelisahan di antara mereka.

Dengan demikian secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unversitas Lambung Mangkurat tidak berjalan dengan baik. Dapat dikatakan sampai tahap interpretasi, hal ini khususnya pada periode 2008-2011 dimana tidak dipengaruhi akreditas yang sudah tidak berlaku.

Faktor pertama adalah faktor kumunikasi, dimana di dalamnya meliputi transmisi, konsistensi dan kejelasan. Proses transmisi, berarti tersampainya program sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas, berlanjut ke tingkat fakultas kemudian turun kepada program studi.Persoalan transmisi dalam komunikasi implementasi kebijakan tersebut yang kurang maksimal juga diperparah oleh kondisi-kondisi lain. Misalnya jarak lokasi antara program studi penjaskesrek dengan FKIP Unlam sangat jauh, yaitu sekitar 40km. Jauhnya jarak tersebut membuat para dosen di program studi tidak bisa intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan di fakultas. Sehingga implementasi sistem penjaminan mutu internal ini tidak dapat terkomunikasikan secara baik.

Kondisi komunikasi implementasi seperti diruaikan sebelumnya, turut serta mempengaruhi kondisi struktur organsasi. Untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unversitas Lambung Mangkurat belum terbentuk struktur organisasi dengan baik, belum tersusun rapi dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.Kondisi struktur yang tergambar demikian menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam rangka sistem penjaminan mutu internal di program studi penjaskesrek belum berjalan dengan baik namun demikian tidak ditemukannya adannya kelompok – kelompok dosen yang saling bertentangan dalam implementasi penjaminan mutu tersebut.

Faktor berikutnya adalah sumber daya juga belum memadai, baik berupa fasilitas, keuangan dan manusiauntuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan visi dan misi serta strategi. Kondisi dosen masih dijumpai banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan, karena berawal dari proses rekuritmen yang memang kurang selektif. Mendesaknya kebutuhan dosen sementara input yang masuk kurang sesuai harapan, akhirnya masih banyak dosen yang kurang memiliki kompetensi sebagaimana mestinya. Kondisi seperti ini juga disebabkan belum ada program pengembangan kompetensi dosen yang sistematis dan konsisten. Pemetaan kompetensi keahlian dosen saat ini belum berjalan dengan baik, sedangkan program pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan juga belum berjalan maksimal.

Sumber daya lainnya adalah keuangan yang dikelola oleh program studi penjaskesrek Unlam yang masih kurang memadai. Selama ini program studi masih mengandalkan dana-dana talangan yang ada, karena dananya yang dianggarkan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam pengelolaan program studi. Fasilitas yang ada saat ini sebenarnya sudah mencukupi untuk proses pembelajaran yang dijalankan. Namun demikian guna pencapain mutu yang lebih tinggi, maka dukungan fasilitas seperti internet, laboratorium olah raga, lapangan, alat-alat olah raga juga masih perlu ditingkatkan.

Faktor terakhir adalah menyangkut disposisi atau sikap para pelaksana. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa komunikasi implementasi yang berjalan kurang maksimal, menimbulkan berbagai hal lain seperti kurang intensnya komunikasi antar dosen. Ini menimbulkan sikap kurang peduli bagi dosen-dosen untuk menunjukkan komitmen yang lebih tinggi bagi pengembangan mutu program studi. Hal lain adalah kondisi dosen yang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya, menimbulkan sikap dan perilaku dosen kurang maksimal dalam melakukan proses pembelajaran. Sikap-sikap seperti ini secara langsung memang tidak menunjukkan ketidaksetujuan terhadap program sistem penjaminan mutu internal di program studi (prodi) penjaskesrek Unlam, namun sikap tersebut sebagai sebuah disposisi yang kurang mendukung bagi implementasi sistem penjaminan mutu internal di prodi. Dengan demikian, jelas nampak adanya sikap dari para dosen yang menunjukkan komitmen yang kurang maksimal, khususnya para pejabat di tingkat program studi. Sehingga waktu selama tiga tahun menunjukkan kurangnya sikap dan komitmen (disposisi) mereka dalam implementasi penjaminan mutu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut : (a) Dengan kerangka teroritik Charles O'Jonnes mengenai proses implementasi sebuah kebijakan, maka implementasi penjaminan mutu di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unlam tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tahun 2008-2011 dapat dikatakan tidak berjalan sama sekali, dan berhenti pada tahap impretasi, penerjemahan konsep/ rencana dalam bentuk program dan strategi semata. Meski harus diakui selama itu

pula beberapa strategi, seperti peningkatan mutu dosen dan mahasiswa juga berjalan, namun tidak dibingkai dalam kerangka penjaminan mutu internal dan akreditas. Kegiatan-kegiatan bermutu oleh dosen dan mahasiswa seolah terpisah, bukan sebagai program dar penjaminan mutu dan akreditasi, sehingga pengendalian dan pengarahan kegiatan tersebut kurang maksimal dan (b) beberapa faktor kendala yang membuat implementasi sistem penjaminan mutu internal di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP Unlam belum berjalan dengan baik yaitu : faktor komunikasi yang kurang intensif, sumber daya manusia kurang memadai, struktur yang belum tegas dan sikap atau komitmen dari para pejabat dan dosen kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disampaikan saran-saran sebagai berikut; 1) Hendaknya pihak kampus, dalam hal ini fakultas dan program studi untuk lebih aktif dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal. Pengalaman tahun 2008-2011 hendaknya dijadikan dasar untuk menata penjaminan mutu dan akreditasi yang lebih baik di masa mendatang. 2) Hendaknya perlu didorong komitmen pejabat dan dosen dalam sistem penjaminan mutu dan akreditasi. Hal ini bisa ditempuh melalui dukungan sumber daya manusia yang khusus menangani penjaminan mutu dan akreditasi, dukungan dana dan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

BAN-PT, Buku Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011.

Kementiran Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Buku Panduan SMP-PT 2010.

Kementiran Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Buku Panduan SMP-PT 2010.

Koran Jakarta, Digital Edition, "Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia dan Mengangkat Kembali 'Link and Match'", 31 Agustus 2012, dapat diakses di http://koranjakarta.com/index.php/detail/view01/99485

Miles, BB dan A.M Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.

Moleong, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta.